

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan peran aktif pemerintah dalam memajukan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengembangan wilayah, pemerintah menerapkan konsep otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah melalui kebijakan desentralisasi. Konsep *power sharing* diterapkan oleh pemerintah mengingat luasnya wilayah negara yang perlu dikelola, dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pembangunan di Indonesia berlangsung secara berkelanjutan dan bertahap kearah kemajuan serta peningkatan seluruh aspek kehidupan negara. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak akan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya perumusan kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang jelas. Pada dasarnya, tujuan pembangunan suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor utama dalam proses pembangunan yang semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak proyek pembangunan yang harus dilakukan.

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas layanan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sarana pendidikan harus digunakan dengan tepat dan efektif untuk mengoptimalkan manfaatnya. Pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya selalu dalam kondisi yang baik untuk digunakan saat dibutuhkan. Perencanaan sangat penting dalam mencakup kebutuhan untuk menentukan apa yang diperlukan guna mendukung proses pembelajaran. Perencanaan ini juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas agar sarana bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan pendidikan dan pengajaran.

Sarana kesehatan tentunya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perencanaan spasial harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi agar semuanya dapat digunakan secara optimal untuk pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan mencakup berbagai tempat seperti rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), sedangkan prasarana kesehatan meliputi alat-alat pendukung seperti alat transportasi dan peralatan medis lainnya.

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata dan adil adalah tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor kesehatan. Ketersediaan yang merata dan adil tersebut mencakup distribusi yang seimbang dan akses yang mudah bagi seluruh masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan penambahan jumlah penduduk, aktivitas seperti

penyuluhan kesehatan juga meningkat. Demikian pula, karena peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, pemerintah diharapkan untuk menambah atau memperbaiki fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan agar sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan untuk mengurangi ketimpangan. Kondisi di mana kebutuhan akan layanan kesehatan belum terpenuhi dan sarana kesehatan di rumah sakit kurang optimal mengakibatkan masyarakat harus mencari layanan kesehatan di tempat lain. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk dengan menyediakan fasilitas kesehatan. Kesehatan penduduk dianggap sebagai aset vital bagi kemajuan bangsa. Dengan penduduk yang sehat, diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan lebih efisien dan berhasil.

Pada umumnya wilayah akan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penduduk haruslah diseimbangkan dengan peningkatan fasilitas, termasuk fasilitas sosial yang meliputi fasilitas pelayanan pendidikan (SD,SMP,SMA), fasilitas kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas), Pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh pertumbuhan alami dan migrasi. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahun membutuhkan pertumbuhan investasi serta pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks bagi pemerintah setempat dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Sadyohutomo, 2008).

Kecamatan Balige adalah sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kecamatan Balige merupakan kecamatan di kawasan pusat kota, sebagian wilayahnya adalah kawasan perdagangan dan pusat pemerintahan

yang terdiri dari 29 desa dan 6 kelurahan. Dimana ada 9 desa/kelurahan berbatasan langsung dengan Danau Toba dan 26 desa/kelurahan tidak berbatasan. Dengan populasi terbesar dan kepadatan penduduk mencapai 511,46 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk Kecamatan balige pada tahun 2022 berjumlah 45.411 jiwa dengan jumlah penduduk usia sekolah mencapai 14.675 jiwa ( Kantor Camat balige, 2021). Beberapa fasilitas yang memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia meliputi sarana pendidikan dan kesehatan.

Dalam sektor pendidikan, menampung 31 sekolah dasar, terdiri dari 26 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta dengan jumlah usia sekolah 4.204 jiwa. Sementara itu, untuk tingkat SMP, terdapat 8 sekolah, yang terbagi menjadi 6 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta dengan jumlah usia 3.382. jiwa. Pada tingkat SMA, Kecamatan Balige memiliki 3 sekolah, dengan komposisi 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta dengan jumlah usia 2.759 jiwa. Di sektor kesehatan, terdapat 1 rumah sakit dan 2 puskesmas di Kecamatan Balige. Dengan besarnya jumlah penduduk usia sekolah maka pemerintah harus mengoptimalkan segala fasilitas pendidikan yang mencakup dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas yang tersebar di 35 desa dengan luas wilayah 91,05Km<sup>2</sup>.

Dengan bertambahnya populasi dan kegiatan masyarakat Kecamatan Balige yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yaitu: pada tahun 2020 jumlah penduduk berjumlah 44.635 jiwa, pada tahun 2021 penduduk berjumlah 45.644 jiwa, pada tahun 2022 penduduk Kecamatan Balige berjumlah 45.411 jiwa dan pada tahun 2023 penduduk kecamatan balige mengalami peningkatan penduduk berjumlah 46.706 jiwa (BPS Kecamatan

Balige dalam angka, 2024). Pertambahan penduduk Kecamatan Balige ini mengakibatkan terjadinya perubahan spasial tata ruang wilayah terutama dalam sarana seluruh penduduk tersebut tentu membutuhkan sarana dan prasarana sosial untuk memenuhi kebutuhan.

Keadaan sarana pendidikan tahun 2023 pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Balige yaitu hanya terdapat 3 sekolah yang terdiri dari 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Peningkatan layanan harus ditingkatkan mengingat pendidikan adalah kebutuhan primer dalam pengembangan sumber dayamanusia guna mensejahterakan penduduk dalam persaingan global. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kota Balige.

Minimnya sarana dan prasarana, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan, menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Selain itu, akses jalan menuju sarana tersebut juga belum memadai. sehingga siswa yang ingin bersekolah maupun masyarakat yang membutuhkan, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan ini karena distribusi sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas di seluruh wilayah. Hingga saat ini, Kecamatan Balige juga belum memiliki peta sebaran sarana pendidikan dan kesehatan yang bisa dijadikan dasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses layanan dasar ini. Berdasarkan permasalahan ini, penting dilakukan analisis spasial untuk mengetahui persebaran sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Balige. Analisis spasial ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas akses sarana pendidikan dan kesehatan sehingga dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Balige dalam membantu memberikan informasi persebaran. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan kajian terkait “Analisis Spasial Sarana Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dikemukakan maka permasalahan - permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya pertambahan jumlah penduduk baik disebabkan faktor alami dan urbanisasi sehingga membutuhkan sarana pendidikan dan kesehatan lebih banyak.
2. Masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses karena keterjangkauan sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.
3. Tidak tersedianya kelengkapan fasilitas dan kecukupan sarana pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat.
4. Masih terbatasnya informasi terkait peta sebaran sarana pendidikan dan kesehatan dikecamatan balige. sehingga perlu dilakukan melihat sebaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka masalah ini dibatasi pada pemetaan sebaran sarana pendidikan dan kesehatan, Tingkat aksesibilitas, Kesesuaian dan Ketercukupan sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Balige.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dimulai dengan latar belakang, beberapa masalah berikut akan diangkat pada penelitian, yang diantaranya:

1. Bagaimana sebaran sarana Pendidikan ( Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas ) dan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas ) di Kecamatan Balige ?
2. Bagaimana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Balige ?
3. Bagaimana kesesuaian sarana pendidikan dan kesehatan di masing-masing di wilayah Kecamatan Balige ?
4. Bagaimana ketercukupan sarana dengan jumlah penduduk di Kecamatan Balige ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebaran sarana Pendidikan ( Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas ) dan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas ) serta untuk menghasil pemetaan sebaran sarana di Kecamatan Balige.
2. Untuk mengetahui masyarakat dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Balige.
3. Untuk mengetahui kesesuaian sarana pendidikan dan kesehatan di masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Balige.
4. Untuk mengetahui ketercukupan sarana dengan jumlah penduduk dikecamatan balige.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mungkin menjadi dasar bagi pemerintah Kecamatan Balige dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan dengan pemahaman yang jelas tentang sebaran sarana.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi bagaimana sebaran sarana pendidikan dan kesehatan yang mungkin dapat membantu dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti pembangunan sekolah baru atau fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang kurang terlayani dikecamatan Balige.

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah referensi dalam pembelajaran atau materi yang berkaitan dengan pembangunan wilayah baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.
- b. Harapannya, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar oleh guru di sekolah, khususnya dalam mata pelajaran geografi, sehingga siswa dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya sarana pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan daerah.

- c. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau panduan untuk penelitian sebagai Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, informasi mengenai sebaran sarana pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Balige tidak hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan praktis, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan penelitian di bidang akademik.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY